

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Institusi keuangan yaitu salah satunya perbankan menjadi pedoman perekonomian Indonesia. Fungsi utama dari perbankan yaitu memiliki fungsi intermediasi dimana bank akan meyakinkan para nasabah untuk bisa menyimpan dana di bank dengan produk tabungan, giro, maupun deposito. Dalam hal ini bank akan terus bertanggung jawab dalam kepemilikan dana tersebut untuk bias melakukan fungsi utamanya dalam menyaurkan dana kepada nasabah pembiayaan atau kepada masyarakat. Semua ini khususnya untuk bias meningkatkan taraf akreditasi bank dan kualitas hidup masyarakat dan perekonomian negara.

Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan sektor perbankan syariah sebagai penggerak pertumbuhan (Ninglasari et al., 2023). Walaupun pangsa pasar bank syariah di Indonesia cenderung sedikit tetapi seiring berjalannya waktu, perbankan syariah memiliki andil sebagai akses solusi keuangan bagi masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan fungsinya sebagai pengelola dan social berbasis syariah (Disli et al., 2023). Pemerintah secara berkala menjadikan perbankan syariah sebagai alternative solusi untuk pengembangan perekonomian di Indonesia (Hartarto, 2021).

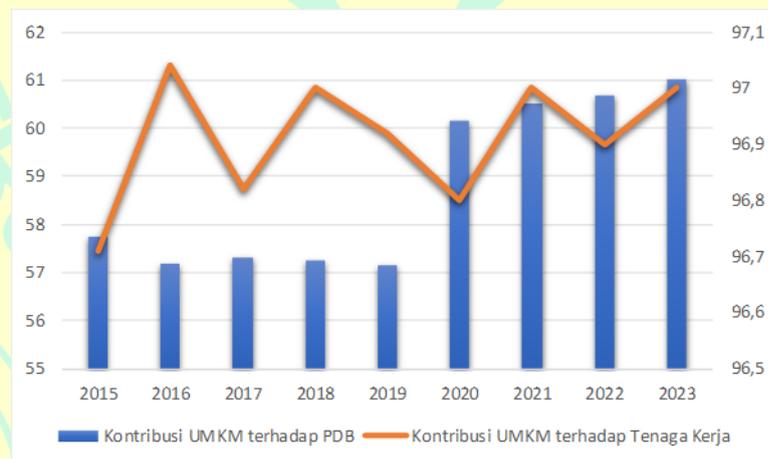
**Tabel 1 1 Pertumbuhan Layanan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

No	Kelompok Bank	Periode					
		2021		2022		2023	
		KC	KCP	KC	KCP	KC	KCP
1	PT. Bank Aceh Syariah	28	95	27	128	27	131
2	PT BPD Riau Kepri Syariah	21	122	21	134	21	145
3	PT BPD Nusa Tenggara Barat	12	24	12	27	12	27
4	PT Bank Muamalat Indonesia	80	131	80	129	80	128
5	PT Bank Victoria Syariah	5	1	2	-	2	-
6	PT Bank Jabar Banten Syariah	9	55	11	60	11	60
7	PT Bank Syariah Indonesia	273	98	154	1021	154	947
8	PT Bank Mega Syariah	30	29	30	35	30	35
9	PT Bank Panin Dubai Syariah	10	-	10	-	10	-
10	PT KB Bukopin	13	7	13	10	13	10
11	PT BCA Syariah	15	16	15	59	15	60
12	PT BTPN Syariah	24	-	16	-	16	-
13	PT Bank Aladin Syariah	1	-	1	-	1	-

Sumber : Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan positif dialami oleh perbankan syariah di Indonesia terdapat pertumbuhan KC dan KCP setiap BUS dari periode ke periode. Berdasarkan dari tabel di atas dari tahun 2021-2023, di Indonesia terdapat 13 Bank Umum Syariah. Disini dapat diperhatikan, sebagian besar KCP BUS mengalami lonjakan tiap tahunnya. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk menjadi urutan pertama bank dengan jumlah KC/KCP terbanyak di setiap tahunnya. Pada tahun 2021, posisi kedua terdapat PT. Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 2022 dan 2023, posisi kedua terdapat PT BPD Riau Kepri Syariah.

Pada era ini, salah satu peran utama perbankan syariah menyalurkan pembiayaan syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021. dilihat dari market share perbankan syariah di dominasi oleh bank umum syariah sebesar 64%, diikuti dengan 34% porsi UUS dan 2% porsi BPRS. Dengan ini, pembiayaan syariah difokuskan sebagai penopang perkembangan sektor-sektor riil. Hal ini diharapkan bahwa dengan adanya pemberdayaan UMKM nantinya UMKM akan berkembang dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ataupun negara (Hartarto, 2021)



**Gambar 1 1 Kontribusi UMKM pada PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja**

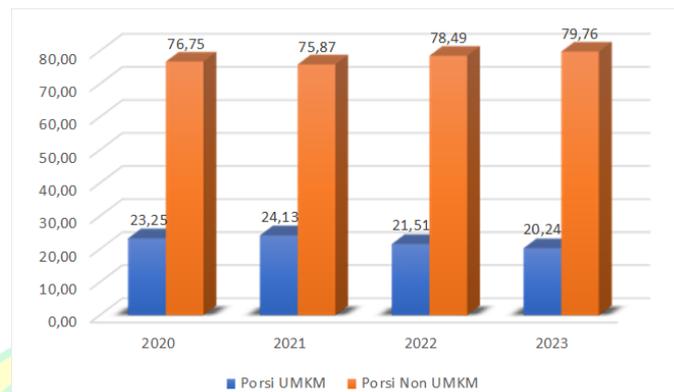
Sumber: Kemenkop UKM

Berdasarkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, semenjak tahun 2020 hingga 2023 Kontribusi UMKM terhadap PDB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, kontribusi UMKM sebesar 61%

untuk PDB atau sebesar Rp9.580 triliun. Kontribusi UMKM kepada penyerapan Tenaga Kerja pada tahun 2021 dan 2023 mencapai 97%. Walaupun terdapat penurunan penyerapan tenaga kerja di tahun 2020 karena pandemic Covid-19. Dilihat dari fakta tersebut, perlu adanya dukungan penuh dari pemerintah agar UMKM lokal dapat terus berkembang sampai dapat melakukan ekspor ke luar negeri.

Dengan besarnya kontribusi UMKM pada perekonomian negara, masalah pembiayaan dan permodalan menjadi salah satu rintangan yang dimiliki oleh sektor UMKM. UMKM nyaris belum mendapatkan akses dan fasilitas permodalan yang memadai. Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam siaran pers Kemenkop UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2020, masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan akses permodalan dari bank maupun non-bank yaitu sebanyak 46,6 juta dari total keseluruhan UMKM 64 juta. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pada triwulan IV-2023, pertumbuhan kredit UMKM mencapai 8,03% (year-over-year), mengalami perlambatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 10,47% (year-over-year). Porsi penyaluran kredit UMKM yang disalurkan oleh bank per Desember 2023 mencapai 20,55% dari total penyaluran pembiayaan .

Dengan target agregat dari pemerintah sebesar 20% untuk penyaluran pembiayaan UMKM, kondisi ini menandakan masih terdapat hambatan dalam mendapatkan pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Sedangkan target agregat Presiden Joko Widodo mengenai penyaluran kredit/pembiayaan UMKM tahun 2024 sebesar 30% oleh karena itu porsi penyaluran kredit UMKM harus terus ditingkatkan. Permasalahan ini juga dihadapi oleh Bank Umum syariah di Indonesia yaitu masih rendahnya pertumbuhan pembiayaan UMKM yang disalurkan kepada nasabah dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan Non-UMKM. Dengan memastikan kebutuhan, sektor UMKM masih memerlukan dukungan lebih besar dalam mengakses modal sehingga dapat mengembangkan nilai usahanya.



**Gambar 1 2 Porsi Pembiayaan UMKM dan Non-UMKM di BUS**

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dengan grafik di atas menggambarkan bahwa BUS menyalurkan tidak lebih dari 25% kepada sektor UMKM. Berdasarkan gambar 1.2 ditemukan penurunan proporsi UMKM dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan disebabkan karena adanya peningkatan pembiayaan non-UMKM yang signifikan. Secara teknik pun, perbankan baik konvensional maupun syariah kesulitan menyalurkan pembiayaan UMKM tersebut disebabkan tidak mencukupinya agunan yang dimiliki oleh pihak UMKM (Hartarto, 2021). Begitupun dengan pernyataan Menteri Menkop UKM, Teten Masduki, bahwa dengan masih menggunakan jaminan atau agunan untuk mendapatkan pembiayaan UMKM di perbankan maka akan sulit sekali pembiayaan UMKM bertumbuh, jadi harus ada inovasi dalam pendekatan credit scoring bukan lagi memakai pendekatan collateral atau jaminan (Rizky, 2023). Dengan demikian, potensi yang sangat menjanjikan dari UMKM belum mampu menjamin peningkatan akses pembiayaan.

**Tabel 1 2 Pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah (triliun)**

Nama Bank Umum Syariah 2021-2023	2021	2022	2023
PT. Bank Syariah Indonesia	39,4	41,91	45,5
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	10,4	11,4	11,3
PT. Bank Muamalat Indonesia	3,3	2,64	2,29
PT. Bank Mega Syariah	2,7	2,2	3,0
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2,0	2,4	3,2
PT. Bank Syariah Bukopin	1,1	1,4	1,6

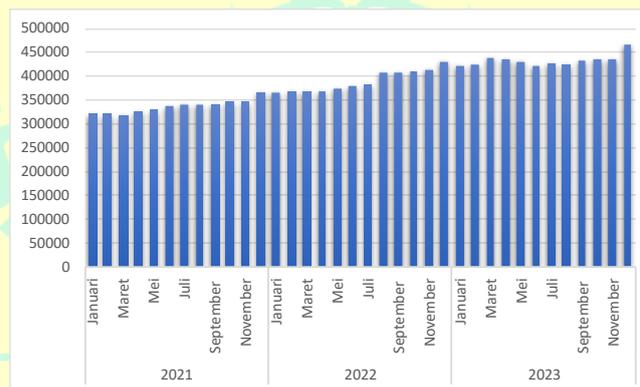
Sumber : website resmi masing-masing bank

Berdasarkan tabel di atas mengemukakan bahwa pembiayaan UMKM

tertinggi disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan Rp45,5 triliun. Lalu diikuti oleh BTPN Syariah yang memiliki portfolio porsi terbesar bagi pembiayaan UMKM pada bank syariah dengan 97% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan BTPN Syariah. Setelah itu diikuti oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Syariah Bukopin serta bank umum syariah lainnya.

Melihat pentingnya penyaluran kredit/pembiayaan untuk mengembangkan dan menguatkan sektor UMKM yang dilakukan bank syariah, perlunya menganalisis hal yang dapat menjadi faktor perubahan distribusi pembiayaan UMKM. Oleh sebabnya, pengelolaan dana yang dilakukan bank akan terus dilakukan dan disalurkan dalam pemyaluran pembiayaan dengan cara mempertimbangkan faktor yang signifikan terhadap pembiayaan yang dilakukan bank. Hal ini bertujuan agar sektor UMKM terbantu dalam mengakses permodalan khususnya dari bank umum syariah.

Demi meningkatkan distribusi pembiayaan UMKM diperlukan kajian dan analisis yang memprediksi faktor internal bank yang harus ditingkatkan dan dipantau terus. Yang pertama, Dana pihak ketiga menjadi sumber permodalan untuk produk pembiayaan (Nihayah, 2022)



**Gambar 1 3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga di BUS**

Sumber : Statistika Perbankan Syariah

Tabel tersebut menyediakan data per bulan, DPK BUS sesekali mengalami penurunan tiap bulannya. Dana pihak ketiga BUS sebesar Rp465,9 miliar pada Desember 2023, dimana mengalami peningkatan sekitar 8,60% dari periode tahun

sebelumnya sebesar Rp429 miliar. Dengan adanya trend yang cenderung mengalami peningkatan, jumlah Dana Pihak Ketiga menjadi modal Bank Umum Syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan UMKM.

Pernyataan ini didukung penelitian terdahulu ditemukan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki kontribusi besar dalam pendistribusian Pembiayaan kepada sektor UMKM yang menjadi salah satu indikator faktor permodalan bank (Muhammad, 2022). Bank akan menyalurkan dana untuk keperluan Pembiayaan bukan hanya dari dana bank itu sendiri tetapi juga dari dana simpanan atau Dana Pihak Ketiga (Umiyati & Ana, 2020). Menurut Khaddafi *et al.* (2022) dan Aziz & Tri (2021), kontribusi DPK terhadap pembiayaan perbankan syariah sangatlah besar yang mana DPK menjadi tolak ukur sebuah bank dalam mengambil keputusan untuk pemberian kredit atau pembiayaan, maka dari itu ketika Dana Pihak Ketiga semakin tinggi akan mempengaruhi tingginya penawaran dana kepada masyarakat lewat produk pembiayaan atau kredit. Sehingga dapat mendorong peningkatan aksesibilitas pembiayaan terhadap sektor UMKM hingga nantinya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan perekonomian Indonesia (Nihayah, 2022). Berbeda dengan hasil penelitian Pramono *et al.* (2019) dan Ninglasari *et al.* (2023).

Profitabilitas menjadi fokus penelitian yang dimana harus menjadi fokus perbankan untuk mengoptimalkan asset yang selanjutnya berdampak pada peningkatan pendapatan lewat pembiayaan (Muhammad, 2022). Return on Asset sebagai tolak ukur bank untuk mengukur profitabilitas bank. Ketika ROA meningkat, maka bank sudah memanfaatkan asset nya secara maksimal untuk menghasilkan laba. Dengan semakin tingginya ROA, kinerja bank semakin baik sehingga bank akan mengoptimalkan pembiayaan untuk memperoleh keuntungan yang diperlukan dengan tujuan memperkuat struktur permodalan dalam rangka ekspansi kredit (Kurniawan & Yudhanti, 2023).



**Gambar 1 4 Rata-Rata ROA pada Bank Umum Syariah**

Sumber : OJK (data diolah penulis)

Secara rata-rata Return on Assets BUS dari tahun 2018 sampai triwulan 2021 masih berada di sekitar 1%, tetapi pada tahun 2022 hingga tahun 2023 nilai Return on Asset BUS mulai pada tingkat 2%. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif ROA dengan Penyaluran Kredit (Muhammad & Muhammad, 2022; Ria & Manzilati, 2023). Sementara itu, penelitian Maghfirlana & Sulaeman, (2021); Mizan, (2019) menghasilkan hal yang sebaliknya

Faktor yang mempengaruhi Bank Umum Syariah mempertimbangkan penyaluran pembiayaan bukan hanya dari aspek permodalan tetapi dari aspek risiko kredit yang akan diterima (Huljak et al., 2021). Dengan indikator dari pembiayaan bermasalah adalah Non-Performing Financing (NPF). Berikut perkembangan NPF dari tahun 2018-2023. Dilihat dari rata-rata NPF selalu mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Hanya saja terdapat kenaikan signifikan pada tahun 2021 sekitar 0,48% (*year-on year*) karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Setelah itu dari tahun 2021-2023 selalu mengalami penurunan.



**Gambar 1 5 Rata-Rata NPF pada Bank Umum Syariah**

Sumber : OJK (data diolah penulis)

Hal ini menjadi tolak ukur bagi Bank Umum Syariah dalam melakukan pembiayaan berkesinambungan kepada nasabah khususnya sektor UMKM yang dibuktikan dalam penelitian Zaimsyah (2020) & Hariyanto & Nafi'ah, (2022) bahwa NPF dapat menjelaskan dan mempengaruhi distribusi penyaluran pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah. Hal ini yang disebabkan karena bank belum memiliki manajemen risiko kredit yang memadai disebabkan karena UMKM masih memiliki risiko tinggi dan bank belum mampu menerapkan etika kehati-hatian dengan memadai dalam menyalurkan dana. Ketika pengendalian dana belum memadai maka akan meningkatkan NPF dan berdampak pada semakin ketatnya bank menawarkan dana kepada nasabah lewat pembiayaan (Ninglasari *et al.*, 2023). Akan tetapi, berbeda hasil penelitian Putri & Musthofa (2023) dan Siregar *et al.* (2021), NPF bukan sebagai pertimbangan BUS untuk melakukan penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan artikel atau penelitian rujukan terdapat *research gap* dari segi waktu penelitian yang menggunakan periode waktu hanya sampai tahun 2021 serta terdapat perbedaan objek penelitian. Dengan adanya penelitian ini ditujukan kepada Bank Umum Syariah agar dapat membuat keputusan penyaluran Pembiayaan UMKM dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang diteliti sehingga kelangsungan penyaluran pembiayaan kepada UMKM mengalami trend positif signifikan di masa depan.

Berdasarkan data dan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas menarik untuk dijadikan permasalahan dan penelitian kali ini, yaitu bagaimana pengaruh faktor internal bank terhadap pembiayaan UMKM. Maka dengan pemaparan di atas serta urgensi penelitian ini, perlulah diteliti **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Assets, Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor UMKM”**. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data Januari 2021 – Desember 2023. Dengan demikian hasil yang didapatkan akan lebih menggambarkan kondisi perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah pada saat ini.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan bukti empiris yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah adanya pengaruh antara perubahan Dana Pihak Ketiga dengan perubahan Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah adanya pengaruh antara perubahan Return on Asset dengan perubahan Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah?
3. Apakah adanya pengaruh antara perubahan Non-Performing Financing dengan perubahan Pembiayaan UMKM Bank Umum Syariah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disesuaikan dengan pertanyaan penelitian di atas sehingga tercipta tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh antara perubahan Dana Pihak Ketiga dengan perubahan Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah
2. Untuk menganalisis dan mengkaji antara perubahan Return on Assets dengan perubahan Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah
3. Untuk menganalisis dan mengkaji antara perubahan Non-Performing Financing dengan perubahan Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis maupun praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk kegiatan civitas akademik dan berbagai pihak yang terkait mengenai skripsi yang diteliti. Manfaat dari skripsi "**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Return On Assets, Non- Performing Financing terhadap Pembiayaan**

**Perbankan Syariah pada Sektor UMKM”** sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang topik penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai wawasan, pengalaman, dan edukasi tambahan dalam melakukan penelitian mengenai topik penelitian.
- b. Bagi Universitas Negeri Jakarta: Diharapkan penelitian ini berguna untuk memabha kajian literatur dan informasi civitas akademik di lingkungan kampus mengenai topik penelitian.
- c. Bagi Bank Umum Syariah: Penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan bagi bank umum syariah mengenai faktor-faktor apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM
- d. Bagi masyarakat: Diharapkan masyarakat dapat terinformasikan dan memiliki pengetahuan yang bertambah mengenai topik penelitian.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini memiliki batasan-batasan yang tujuannya agar fokus penelitian jelas pada topik penelitian dan dapat mencapai tujuan penelitian dengan tepat sasaran. Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2023
2. Return on Assets pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2023
3. Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2023